

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SWARGA BARA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Ryanti Tiballa<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kecamatan Kutai Timur dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis deskriptif kualitatif. Informannya adalah Direktur Bumdes Swarga Bara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun yang lain.*

*Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan program Bumdes serta masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pengurus Bumdes terkait dengan program Bumdes dan masih minimnya kualitas dari pengurus Bumdes menyebabkan belum berjalannya program Bumdes seperti yang diharapkan oleh masyarakat.*

***Kata Kunci:*** Partisipasi, Masyarakat, Pelaksanaan, Program

## **Pendahuluan**

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai lembaga untuk penguatan perekonomian masyarakat adalah Bumdes Swarga Bara Mitra Mandiri yang ada di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. Pendirian Bumdes tersebut juga diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [ryantitiballa@gmail.com](mailto:ryantitiballa@gmail.com)

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian Bumdes ini juga diprakarsai oleh PT.KPC sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) perusahaan tersebut dalam bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan masyarakat yang berada di wilayah penambangan mereka.

Bumdes sebagai wadah untuk memperkuat perekonomian desa tentu telah memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga diharapkan juga ada partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program atau usaha yang dijalankan oleh Bumdes tersebut. Dengan badan pengawasnya yang dipilih dari beberapa orang di masyarakat dari BPD Desa serta masyarakat itu sendiri pun diikuti dalam proses pengawasan. Dalam mewujudkan tujuan program BUMDes diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya program-program dari BUMDes. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah Desa serta pengelola BUMDes untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program BUMDes.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program BUMDes Swarga Bara. Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes Swarga Bara bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah Desa dan pengelola Bumdes, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program Bumdes. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah Desa serta pengelola Bumdes dalam pencapaian pelaksanaan program Bumdes Swarga Bara. Diharapkan adanya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil hingga pada tahap evaluasi pada unit usaha ekowisata, air bersih, penyediaan lahan sawit serta simpan pinjam yang merupakan usaha atau produk dari Bumdes Swarga Bara.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Desa Swarga Bara ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini didasari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan Bumdes, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah desa ataupun pengelola kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Selain masih minimnya sosialisasi dari pengurus Bumdes kepada masyarakat terkait dengan program Bumdes yang menyebabkan minimnya informasi yang dimiliki masyarakat yang berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat, kemudian kesibukan kerja juga masih menjadi penghalang dikarenakan mayoritas penduduk Desa Swarga Bara berprofesi sebagai pekerja tambang dan sisanya sebagai petani atau pekebun yang hampir tidak memiliki waktu dirumah. Sedangkan ibu-ibu rumah tangga masih belum ingin berpartisipasi dikarenakan mereka menganggap bahwa apa yang mereka bisa dapatkan atau timbal baliknya apabila mereka mengikuti kegiatan atau program Bumdes.

Masyarakat Desa Swarga Bara juga banyak yang masih mempertanyakan apakah program-program Bumdes tersebut bersifat jangka panjang dan mampu memberikan manfaat bagi mereka? Kemudian masih minimnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan program, hal tersebut dapat dilihat dari masih seringnya sopir tandon yang tidak membayar air bersih yang mereka beli juga masyarakat yang menunggak pembayaran bahkan ada yang tidak sama sekali membayar pinjaman mereka pada unit simpan pinjam, serta ibu-ibu yang pada awalnya ikut dalam kegiatan kuliner dari program ekowisata kemudian keluar dari kegiatan kuliner dikarenakan adanya pergantian pengurus dan mereka lebih menyukai apabila dikoordinir oleh pengurus yang lama.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Partisipasi***

Menurut Isbandi (2007) partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

### ***Masyarakat***

Koentjaraningrat (1994) bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama”.

M.Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai berikut “masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antar manusia, dipersekitukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka”.

### ***Partisipasi Masyarakat***

Partisipasi masyarakat menurut Adisasmita (2006) adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

Menurut Slamet 2003 menyatakan bahwa partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi politik lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukkan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi sosial ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, implementasi dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah beralih konsep “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

### ***Pelaksanaan Program***

Menurut Westra (2011) pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Hasibuan (2006) juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang sudah jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### ***Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program***

Kaho (2003) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (*participation in decision making*). Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau

pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan.

2. Tahap pelaksanaan (*participation in implementing*). Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil (*participation in benefits*). Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

### ***Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)***

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1, Ayat (6), Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Dimana badan usaha ini dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, BUMDes bisa menjadi alternatif yang dapat dikembangkan untuk mendorong perekonomian desa, dengan harapan menciptakan sumber daya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber daya alam desa. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emasipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*.

Membentuk sebuah badan usaha tentulah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Affandy (2004) tujuan dari pembentukan Bumdes adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

### ***Jenis Usaha yang dilakukan***

Bumdes diarahkan sebagai untuk memilih dan menetapkan jenis usaha yang mampu memperkuat daya saing perekonomian desa dengan pihak luar desa khususnya dalam hal pemasaran, standarisasi produk dan pengembangan jaringan. Selaras dengan jenis usaha yang dismapaikan diatas, menurut Perbub Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain:

1. Pelayanan jasa yang meliputi: simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, air bersih dan usaha lain yang sejenis;
2. Penyaluran 9(Sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
3. Perdagangan sarana produksi dan hasil pertanian yang meliputi: hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan sarana produksi dan hasil-hasil lainnya;
4. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
5. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa.

### ***Program-Program Bumdes Desa Swarga Bara***

1. Unit Kelapa Sawit  
Kelapa sawit merupakan unit yang bisa diandalkan penghasilannya setelah air bersih. Dengan luasan lahan 6 Ha dan jumlah pohon sebanyak 720 pohon bisa panen sebanyak 2 kali jika perawatan dilakukan secara baik dan benar dalam sebulan.
2. Unit Ekowisata  
Ekowisata merupakan sebuah unit perpaduan antara potensi ekonomi agro industri yang sekarang sudah dikelola bersama dengan masyarakat melalui program sadar wisata. Program dari unit ekowisata ini yaitu kuliner/bazar serta kunjungan ke prevab TNK.
3. Unit Air Bersih  
Unit air bersih merupakan salah satu unit Bumdes Swarga Mitra Mandiri yang difasilitasi oleh PT. KPC dalam pengelolaan air bersih. Dengan anggota sopir yang berjumlah 40 orang, dan harga jual per tandon adalah Rp15.000,-
4. Unit Simpan Pinjam  
Unit simpan pinjam merupakan salah satu unit yang berada di tubuh Bumdes. Dimana aturan tentang simpan pinjam tertuang di dalam perjanjian simpan pinjam. Pinjaman maksimal yang bisa diberikan kepada nasabah yaitu Rp1.000.000,-

### ***Hambatan-Hambatan dalam Partisipasi***

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik secara internal (yaitu: motivasi, pengetahuan, pengalaman individu dan sebagainya)

maupun eksternal (yaitu: peran stakeholders, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya). Minimnya sosialisasi yang diberikan dari pihak pengurus Bumdes kepada masyarakat yang berakibat pada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program-program yang dijalankan oleh Bumdes, dimana sosialisasi mengacu pada suatu proses belajar seorang individu yang akan mengubah dari seseorang yang tidak tahu tentang lingkungannya kemudian menjadi lebih tahu dan memahami. Menurut Buhler, sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Menurut Sugiyono (2004) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.

### ***Fokus Penelitian***

Adapun dalam penelitian ini peneliti memberikan fokus penelitian pada:

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BUMDes yaitu:
  - a. Partisipasi dalam perencanaan program
  - b. Partisipasi dalam pelaksanaan program
  - c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil
  - d. Partisipasi dalam evaluasi program
2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

### ***Sumber Data***

Yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah direktur BUMDes Swarga Bara, Kepala Desa Swarga Bara, serta masyarakat desa Swarga Bara.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

### ***Teknik Analisis Data***

Adapun Miles dan Huberman (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana (2014) *Qualitative Data Analysis*,

mengatakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat berbagai kegiatan yang terjadi, yaitu:

1. Pengumpulan data  
Data pertama dan masih bersifat mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, Penelitian kepustakaan dan dokumentasi serta data sekunder lainnya yang berhasil diperoleh.
2. Reduksi data  
Reduksi adalah memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan dengan mengubah data yang mentah yang dikumpulkan dalam penelitian kedalam catatan yang disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempelajari atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan. Selain itu, reduksi data adalah data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian / laporan yang lengkap dan terinci.
3. Data display atau penyajian data  
Penyajian data adalah penyusunan informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman, selain itu penyajian data dapat juga berarti yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. *Conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan  
Penarikan kesimpulan meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam menguji data dengan cara mencatat keteraturan, pola – pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan ubungan sebab akibat melalui hukum – hukum empirik.

## **Hasil Penelitian**

### ***Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program***

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dapat dilihat dari sejauhmana masyarakat itu sendiri ikut atau dilibatkan dalam rapat-rapat desa ataupun musyawarah desa. Kegiatan rapat dalam rangka perencanaan program ini dilakukan per bulan sekali yang dihadiri oleh pengurus Bumdes Swarga Bara, pendamping dari pihak PT. KPC serta dari masyarakat yang dilakukan di Kantor Bumdes Swarga Bara.

Selama penulis melakukan penelitian di Kantor Bumdes telah dilakukan rapat pengurus dan pendamping yang dihadiri dari pengurus Bumdes serta pendamping dari pihak KPC, sementara untuk rapat pengembangan ekowisata melibatkan warga yang menjadi koordinator dari program-program ekowisata.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program masih bersifat tidak langsung, dimana masyarakat memberikan ide-ide atau saran kepada pengurus

tiap-tiap program dan kemudian kepala dari tiap-tiap program lah yang akan membawa ide dari masyarakat tadi di dalam rapat bersama dengan pengurus, pendamping, dan penasehat. Kemudian dalam rapat ini akan disampaikan program-program yang sesuai untuk dijalankan oleh Bumdes Swarga Bara dan dari pihak PT. KPC selaku pendamping akan memberikan arahan-arahan yang terkait dengan program yang akan dijalankan. Kemudian hanya usulan-usulan yang menjadi skala prioritaslah yang akan dilaksanakan.

### ***Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program***

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bumdes, pada tahap ini partisipasi masyarakat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang berbentuk tenaga, barang ataupun informasi.

Masyarakat Desa Swarga Bara memberikan tenaga dalam pelaksanaan program khususnya kuliner yang membutuhkan banyak keterlibatan orang, kemudian dalam menjaga dan merawat fasilitas seperti alat dan workshop Bumdes serta untuk penjagaan unit air telah diberikan kepada Babinsa serta Polmas. Untuk partisipasi dalam bentuk informasi, masyarakat dapat mengarahkan para tamu ataupun turis yang datang untuk berkunjung ke tempat-tempat yang memang hendak turis kunjungi ataupun masyarakat langsung mengantar ke Kantor Bumdes untuk turis asing yang ingin ke Prewab TNK. Dan untuk material barang, masyarakat meminjamkan barang-barang yang dimiliki oleh warga dalam rangka pelaksanaan program Bumdes, masyarakat juga dapat menyewakan rumah-rumah mereka kepada turis atau tamu yang datang berkunjung serta menyewakan perahu untuk tamu yang ingin menuju TNK yang dihargari Rp100.000, - per perahu juga menyediakan peralatan-peralatan untuk memasak ataupun meja dan kursi pada saat kegiatan bazar berlangsung ataupun kegiatan-kegiatan pada saat rapat.

### ***Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil***

Masyarakat dapat menikmati hasil dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Bumdes Swarga Bara, seperti hasil dari kuliner yang merupakan bagian dari program ekowisata dimana pembagian dari hasil penjualan adalah 60% untuk masyarakat yang ikut terlibat dan 40% masuk kedalam kas Bumdes, masyarakat juga dapat membeli air bersih yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan harga Rp1000 per 20 liter dan Rp15.000 per tandon yang dimana air bersih merupakan bantuan dari pihak PT. KPC yang merasa bahwa masyarakat sangat membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari.

### ***Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Program***

Kegiatan rapat evaluasi dilakukan oleh pengurus Bumdes bersama dengan pendamping dari PT. KPC dan yang dilaksanakan di Kantor Bumdes Swarga Mitra Mandiri. Evaluasi program yang dilakukan melalui rapat-rapat, masih bersifat partisipasi tidak langsung dimana masyarakat tidak bisa ikut langsung dalam kegiatan rapat melainkan melalui perwakilan dari tiap program serta dihadiri oleh pendamping dari PT.KPC. Dimana dalam rapat evaluasi ini membahas mengenai program-program Bumdes yang telah dijalankan, apakah sudah sesuai dengan tujuan atautkah belum, dan mencari solusi dari permasalahan program yang belum mampu berjalan dengan optimal.

### ***Hambatan-Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat***

1. Minimnya sosialisasi dari Bumdes terkait dengan program-program Bumdes. Salah satu faktor yang menghambat ikut berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bumdes di Desa Swarga Bara yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana atau pengurus Bumdes sehingga mengakibatkan minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat yang berdampak pada kurangnya tingkat partisipasi masyarakat.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Kewajibannya Pada Program Bumdes. Dari hasil penelitian di lapangan bahwa adanya sopir tandon yang menolak untuk melakukan pembayaran ketika selesai melakukan pengisian air, kemudian salah satu dari program ekowisata yaitu kuliner dimana ibu-ibu yang awalnya ikut terlibat aktif dalam kegiatan kemudian memutuskan untuk tidak lagi mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan adanya pergantian pengurus, yang dimana mereka lebih menyukai Ibu Dina yang menjadi pengurus di Bumdes.

### **Kesimpulan**

1. Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur dalam perencanaan program masih terbatas pada partisipasi tidak langsung, dimana masyarakat ikut andil dalam memberikan ide-ide terkait dengan program-program yang sesuai untuk dijalankan di Desa Swarga Bara sesuai dengan potensi desa yang dimana penyampaian ide atau gagasan tersebut diberikan kepada perwakilan dari setiap program. Kemudian ide dari masyarakat tadi akan disampaikan dalam rapat bersama dengan pendamping dari pihak PT.KPC.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dapat dilihat dari keikutsertaan ibu-ibu dalam program ekowisata seperti kegiatan kuliner dan bazar, pembuatan pakaian batik atau souvenir khas, serta penyewaan rumah dan perahu untuk turis yang akan berkunjung ke prevab TNK. Belum optimalnya pelaksanaan program dapat dilihat dari kegiatan lebih banyak dilakukan di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun yang

lain, adanya masyarakat yang tidak membayar pinjaman mereka pada unit simpan pinjam bahkan ketika mereka pindah tempat tinggal, workshop ekowisata yang seharusnya dimaksimalkan untuk pengerjaan kerajinan seperti batik dan souvenir terlihat kotor dan tidak terawat.

3. Partisipasi masyarakat dalam pembagian hasil usaha diberikan kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program Bumdes. Dalam program ekowisata khususnya kuliner pembagian sebesar 40% dari hasil penjualan masuk ke kas Bumdes sedangkan 60%nya kepada ibu-ibu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program masih cenderung kepada partisipasi tidak langsung dimana masyarakat belum bisa ikut terlibat langsung dalam rapat-rapat yang diselenggarakan dan hanya melalui perwakilan-perwakilan dari setiap kepala unit dimana yang ikut di dalam kegiatan evaluasi adalah pengurus Bumdes, pendamping dari pihak KPC serta pengawas.
5. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bumdes Swarga Bara masih cukup besar, hal tersebut dilihat dari belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dikarenakan adanya faktor Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan program Bumdes. Selain hal tersebut diatas masih minimnya sosialisasi dari pihak Bumdes dan pemerintah Desa terkait program-program Bumdes membuat masyarakat masih belum mengetahui akan program-program yang ada.

### **Saran**

1. Pengurus Bumdes lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi agar masyarakat tahu akan program dari Bumdes. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan ketua RT yang kemudian diperikan penjelasan tentang program Bumdes yang dimana nantinya ketua RT tersebut dapat memberikan informasi kepada warganya terkait dengan program Bumdes. Sehingga masyarakat yang telah terlibat di dalamnya mengerti akan kewajiban mereka di dalam melaksanakan program dari Bumdes.
2. Pentingnya pelaksanaan program melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program. Masyarakat dapat dikumpulkan di workshop kemudian diberikan pelatihan tentang memproduksi sebuah barang, membatik, maupun diajarkan untuk mengubah limbah plastik menjadi produk siap jual ataupun melatih masyarakat dalam sistem pengemasan suatu barang sehingga menjadi produk yang layak jual.
3. Perlunya memperketat sistem peminjaman pada unit simpan pinjam serta memberikan sanksi yang tegas apabila masyarakat tidak membayar

pinjaman mereka. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat yang akan melakukan peminjaman benar-benar adalah masyarakat yang nantinya akan mampu membayar kewajibannya sehingga masyarakat menilai bahwa unit simpan pinjam merupakan unit yang mampu berjalan dengan baik.

4. Perlunya dibangun kerjasama dengan pihak luar untuk lebih mempromosikan hasil-hasil karya atau produksi dari Bumdes terutama dinas-dinas terkait, maupun promosi melalui situs internet untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi yang menyediakan informasi tentang wisata ke prevab TNK ataupun wisata agro (kegiatan belajar menanam, merawat tanaman, dan memetik buah).

#### **Daftar Pustaka**

- Adi, Isbandi. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Isbandi, Rukmito Adi. 2007. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas dan Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: Fisip UI Press
- Miles, Matthew & Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Slamet, Y. 1990. *Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: Pusat Antar Study sosial UGM.

#### **Dokumen-dokumen:**

- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah